

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI**



LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

NERACA.....	1-2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
LAPORAN OPERASIONAL.....	4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	6-16



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	1.810.228.472,64	2.165.750.984,29
1.1	ASET LANCAR	(0,00)	3.790.816,45
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	3.790.816,45
	JUMLAH ASET LANCAR	(0,00)	3.790.816,45
1.3	ASET TETAP	1.810.228.472,64	2.161.960.167,84
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.788.787.001,00	8.769.582.001,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.237.247.612,00	1.237.247.612,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.841.850,00	105.841.850,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	221.585.000,00	221.585.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.543.232.990,36)	(8.172.296.295,16)
	JUMLAH ASET TETAP	1.810.228.472,64	2.161.960.167,84
1.5.04	Aset Lain-lain	18.462.895,00	18.462.895,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.462.895,00)	(18.462.895,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.810.228.472,64	2.165.750.984,29
2	KEWAJIBAN	6.982.959,00	5.554.256,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.982.959,00	5.554.256,00
2.1.06	Utang Belanja	6.982.959,00	5.554.256,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.982.959,00	5.554.256,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.982.959,00	5.554.256,00
3	EKUITAS	1.803.245.513,64	2.160.196.728,29
3.1	EKUITAS	1.803.245.513,64	2.160.196.728,29
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(27.185.036.812,98)	(26.761.258.009,29)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	26.827.952.265,00	26.315.110.215,00
	JUMLAH EKUITAS	1.803.245.513,64	2.160.196.728,29
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.810.228.472,64	2.165.750.984,29

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
---------------	--------	------	------

Provinsi Jambi, 14-04-2025
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja



RAHMAH HUDA KAT, S.Sos, M.Si
NIP. 196612291985121001

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	27.006.263.981,00	26.827.952.265,00	99,34	26.316.360.215,00
5.1	BELANJA OPERASI	26.987.058.981,00	26.808.747.265,00	99,34	26.316.360.215,00
5.1.01	Belanja Pegawai	21.934.604.693,00	21.869.248.687,00	99,70	20.925.625.173,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.052.454.288,00	4.939.498.578,00	97,76	5.391.735.042,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	26.987.058.981,00	26.808.747.265,00	99,34	26.316.360.215,00
5.2	BELANJA MODAL	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	27.006.263.981,00	26.827.952.265,00	99,34	26.316.360.215,00
	SURPLUS/DEFISIT	(27.006.263.981,00)	(26.827.952.265,00)	99,34	(26.316.360.215,00)

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
R. H. HADRI, S.T., S.Sos., M.Si
NIP. 196612201985121001



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	27.185.036.812,98	26.761.258.009,29	423.778.803,69	1,58
8.1	BEBAN OPERASI	26.813.966.784,45	26.332.547.481,56	481.419.302,89	1,83
8.1.01	Beban Pegawai	21.869.248.687,00	20.925.625.173,00	943.623.514,00	4,51
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.944.718.097,45	5.406.922.308,56	(462.204.211,11)	(8,55)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	26.813.966.784,45	26.332.547.481,56	481.419.302,89	1,83
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	371.070.028,53	428.710.527,73	(57.640.499,20)	(13,45)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	343.011.105,04	400.651.604,24	(57.640.499,20)	(14,39)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.744.952,24	24.744.952,24	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.313.971,25	3.313.971,25	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	371.070.028,53	428.710.527,73	(57.640.499,20)	(13,45)
	JUMLAH BEBAN	27.185.036.812,98	26.761.258.009,29	423.778.803,69	1,58
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(27.185.036.812,98)	(26.761.258.009,29)	(423.778.803,69)	1,58



Provinsi Jambi, 14 April 2025
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

WILDAYAT, S.Sos, M.Si
NIP. 196612291985121001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	2.160.196.728,29	2.606.344.522,58
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(27.185.036.812,98)	(26.761.258.009,29)
RK PPKD	26.827.952.265,00	26.315.110.215,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	133.333,33	0,00
EKUITAS AKHIR	2.006.245.513,64	2.160.196.728,29



Provinsi Jambi, 14 April 2025
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si
NIP. 196612201985121001

Diketak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi SKPD selama periode pelaporan;
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan, menilai kondisi keuangan dan efisiensi SKPD.

1.1.2 Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi tentang pendapatan dan alokasinya sesuai peraturan;
- b. Menyediakan informasi sumber daya ekonomi yang digunakan dan hasilnya;
- c. Menyediakan informasi perubahan posisi keuangan SKPD selama tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. UU No. 9 Tahun 2015);
- e. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang SAP Berbasis Akrua;
- h. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 0 atau 0% dari target sebesar Rp 0 naik 0% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi adalah sebesar Rp26.827.952.265,00 dari anggaran sebesar Rp27.006.263.981,00 atau sebesar 99,34%. Realisasi tersebut menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran yang tinggi. Adapun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.316.360.215,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp511.592.050,00 atau sekitar 1,94%.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	-	-	0,00%	-
BELANJA	27.006.263.981	26.827.952.265	99,34%	26.316.360.215
Surplus (defisit)	(27.006.263.981)	(26.827.952.265)	99,34%	(26.316.360.215)

2.1.1. Pendapatan

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tidak memiliki anggaran pendapatan maupun realisasi pendapatan.

2.1.2. Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa,. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 99,27 %. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 26.808.747.265.

Belanja Modal berupa Belanja Peralatan dan Mesin,. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 0,07%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 19.205.000 atau sebesar 100% dari Anggaran Belanja Modal Tahun 2024. Gambaran

lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	27.006.263.981,00	26.827.952.265,00	99,34	26.316.360.215,00
5.1	BELANJA OPERASI	26.987.058.981,00	26.808.747.265,00	99,34	26.316.360.215,00
5.1.01	Belanja Pegawai	21.934.604.693,00	21.869.248.687,00	99,70	20.925.625.173,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.207.412.641,00	12.147.848.597,00	99,51	11.571.688.378,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	8.646.292.858,00	8.641.470.256,00	99,94	8.108.305.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	964.237.568,00	963.497.226,00	99,92	912.978.594,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	210.985.481,00	209.660.000,00	99,37	215.230.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	931.956.893,00	930.600.000,00	99,85	917.700.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.663.307,00	89.140.000,00	98,32	97.951.236,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	539.749.070,00	538.008.180,00	99,68	560.458.380,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.058.808,00	18.857.361,00	94,01	17.055.924,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	396.970,00	116.496,00	29,35	114.001,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	687.923.598,00	685.606.311,00	99,66	675.308.617,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	17.753.856,00	17.723.067,00	99,83	16.646.676,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	53.476.848,00	53.169.700,00	99,43	49.939.950,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	43.917.384,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.688.312.052,00	9.682.520.090,00	99,94	9.172.806.795,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.350.989.570,00	4.348.329.020,00	99,94	4.111.375.817,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	350.240.647,00	348.184.068,00	99,41	283.577.133,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.987.081.835,00	4.986.007.002,00	99,98	4.777.853.845,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	38.880.000,00	38.880.000,00	100,00	181.130.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	38.880.000,00	38.880.000,00	100,00	181.130.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.052.454.288,00	4.939.498.578,00	97,76	5.390.735.042,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.562.388.150,00	1.541.465.282,00	98,66	1.699.161.565,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.562.388.150,00	1.541.465.282,00	98,66	1.699.161.565,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.637.312.706,00	2.598.804.333,00	98,54	2.810.702.513,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.637.312.706,00	2.598.804.333,00	98,54	2.779.721.723,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00	30.980.790,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	117.440.000,00	117.440.000,00	100,00	85.271.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.440.000,00	117.440.000,00	100,00	35.321.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	735.313.432,00	681.788.963,00	92,72	795.599.464,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	735.313.432,00	681.788.963,00	92,72	795.599.464,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	26.987.058.981,00	26.808.747.265,00	99,34	26.316.360.215,00
5.2	BELANJA MODAL	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	27.006.263.981,00	26.827.952.265,00	99,34	26.316.360.215,00
	SURPLUS/DEFISIT	(27.006.263.981,00)	(26.827.952.265,00)	99,34	(26.316.360.215,00)

2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 antara lain:

1. Penyusutan nilai aset tetap yang berdampak pada total nilai aset tahun berjalan.
2. Tidak adanya pendapatan, sehingga seluruh pembiayaan berasal dari transfer dan saldo awal.

BAB III

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1 Neraca

Aset per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.810.228.472,64, turun dari Rp2.165.750.984,29 di tahun 2023. Penurunan disebabkan oleh penyusutan aset tetap. Kewajiban sebesar Rp6.982.959,00 berupa utang jangka pendek. Ekuitas menurun menjadi Rp1.803.245.513,64 akibat defisit operasional.

3.2 Laporan Operasional

Beban operasional mencapai Rp27.185.036.812,98 pada tahun 2024, meningkat 1,58% dari tahun sebelumnya. Beban Pegawai sebesar Rp21.869.248.687,00, dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp4.944.718.097,45. Defisit LO tercatat sebesar Rp27.185.036.812,98.

3.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp2.160.196.728,29. Setelah mengalami defisit LO sebesar Rp27.185.036.812,98 dan menerima transfer dari RK PPKD sebesar Rp26.827.952.265,00, serta penyesuaian lainnya Rp133.333,33, ekuitas akhir menjadi Rp1.803.245.513,64.

3.4 Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp27.006.263.981,00 dengan realisasi Rp26.827.952.265,00 (99,34%). Komponen terbesar belanja adalah Belanja Pegawai (Rp21.869.248.687,00) dan Belanja Barang dan Jasa (Rp4.939.498.578,00). Belanja Modal terealisasi penuh Rp19.205.000,00. Seluruh pendanaan berasal dari transfer pemerintah.

BAB IV

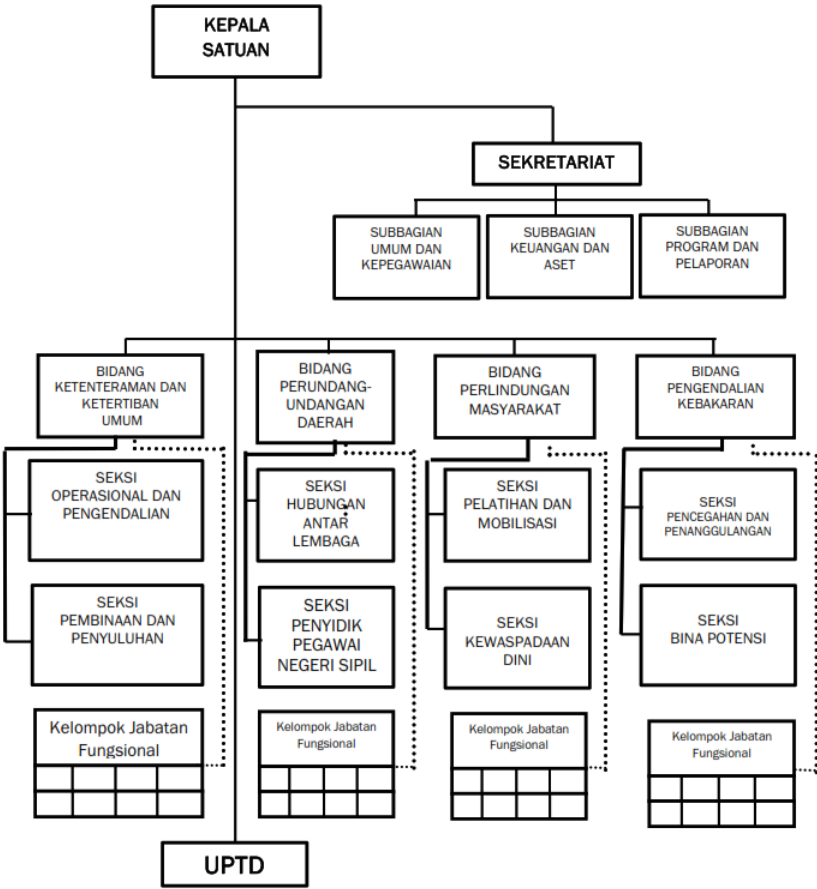
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi adalah perangkat daerah yang bertugas dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Wilayah kerja mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Informasi geografis, luas wilayah dan jumlah personel merupakan bagian dari kebijakan operasional non keuangan.

5.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



5.2 Kedudukan

Kedudukan

- (1) Satuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan.

Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;
- b. penyusunan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- d. penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran;
- f. penyusunan koordinasi penegakan Perda dan Pergub serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, instansi terkait dan/atau aparatur lainnya;
- g. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Pergub; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik. Meski demikian, perlu perhatian lebih pada pengelolaan aset tetap dan efisiensi belanja agar kinerja tahun-tahun berikutnya semakin optimal.

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1. Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tidak memiliki anggaran pendapatan maupun realisasi pendapatan dikarenakan seluruh layanan tidak dipungut biaya.

5.1.2. Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 26.827.952.265 atau 99,34 % dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.1. Belanja Operasi

- Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 26.808.747.265,00 atau sebesar 99,34 % dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,
- Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 21.934.604.693,00 terealisasi sebesar Rp 21.869.248.687,00 atau 99,70 % dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 5.052.454.288,00 terealisasi sebesar Rp 4.939.498.578,00 atau sebesar 97,76 % dari anggaran.

5.1.2.2. Belanja Modal

- Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 19.205.000,00 atau 100% dari anggaran.

- Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa komputer unit lainnya.

5.2. Neraca

5.2.1. Aset.

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 1.810.228.472,64 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 0,00, Aset Tetap sebesar Rp 1.810.228.472,64 dan Aset Lainnya sebesar Rp 0,00.

5.2.2. Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 6.982.959,00, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3. Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 1.803.245.513,64

5.3. Laporan Operasional

5.3.1. Beban-LO

Jumlah Beban-LO per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp 27.185.036.812,98 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp 26.813.966.784,45 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 371.070.028,53.

5.3.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember tahun 2024 sebesar (27.185.036.812,98).

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 2.160.196.728,29 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp (27.185.036.812,98) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2024.

5.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
sebesar Rp 133.333,33 yang merupakan nilai dari koreksi lain-lain.

5.4.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 1.803.245.513,64 merupakan ekuitas per
31 Desember 2024.

Provinsi Jambi, 14 April 2025

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si

NIP. 196612291985121001